

PERSPEKTIF TEORITIS MODEL REKRUTMEN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK

Soetomo *

Abstrak

Rekrutmen perempuan di bidang politik menjadi fokus menarik dalam kajian-kajian politik ketika penyediaan kuota 30 persen perempuan dalam UU Pemilu kita, sementara kenyataannya bahwa berbagai kendala dalam memenuhi kuota tersebut terjadi di masyarakat karena faktor kepentingan politik dan kemampuan perempuan itu sendiri di bidang politik. Sejauh ini berbagai teori mencoba mengungkapkan partisipasi politik dengan konotasi obyek adalah pada ruang gerak laki-laki, akan tetapi pada dasarnya konotasi itu salah karena partisipasi dan rekrutmen politik dimaksud juga adalah pada ruang gerak perempuan. Kajian ini mencoba menggunakan alat teoritis itu untuk menguak ruang rekrutmen perempuan di bidang politik.

Kata Kunci : Rekrutment perempuan dan politik

1 Pendahuluan

Rekrutmen perempuan di bidang politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan politik oleh perempuan dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan perempuan dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat (Gaffar, 1999:155). Rekrutmen perempuan di bidang politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen perempuan sebagai anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Studi rekrutmen perempuan di bidang politik adalah menyelidiki proses melalui mana seseorang perempuan atau kelompok dilibatkan dalam peranan politik secara aktif. Atas dasar definisi inilah studi tentang rekrutmen perempuan di bidang politik senantiasa dikaitkan dengan analisis tentang elit politik perempuan.

* **Dr. H. Soetomo, M.Si. adalah** Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Elit politik perempuan terdiri dari kaum elit perempuan, kelompok-kelompok khusus atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat, dan dalam tangan mereka terpusatkan kekuasaan politik. Eksistensi mereka bukanlah suatu kebetulan saja, akan tetapi merupakan pengakuan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat yang menciptakan beberapa bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tersebut dapat didasarkan atas; pembagian ekonomi, hirarki religius, diferensiasi status, pembagian etnis dan sebagainya. Dalam kenyataannya di negara-negara industri modern maupun negara berkembang, terbentuknya stratifikasi sosial bisa merupakan kombinasi dari semua hal tersebut, akan tetapi yang jelas nampak adalah adanya masyarakat terbagi ke dalam kategori masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah (Rush & Althoff, 1997:233).

Elit politik ini menurut Mosca merupakan minoritas kecil yang memiliki posisi dominan atas mayoritas, disebabkan mereka mempunyai kemapanan atau keunggulan organisasi dan keistimewaan individu, meskipun tidak semua keistimewaan yang mereka miliki tersebut karena mereka memiliki kelebihan atau kemampuan, akan tetapi karena mereka mempunyai karakteristik yang dihargai oleh masyarakat. Kelompok minoritas ini oleh Mosca disebut sebagai kelas berkuasa (*rulling class*), sedangkan Pareto menyebutnya sebagai elit politik (Rush & Althoff, 1997:234).

Komposisi kelas berkuasa atau elit politik perempuan dapat berubah pada suatu periode waktu, yaitu melalui perekrutan anggota-anggota perempuan dari non-elite, atau dengan jalan melaksanakan pembentukan elit perempuan tandingan, suatu proses yang oleh Pareto disebut sebagai bentuk "sirkulasi elit". Perubahan komposisi dapat juga terjadi akibat adanya revolusi dalam satu masyarakat, yang mengakibatkan adanya banyak perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah kelas menengah dapat saja berubah menjadi bagian dari kelas berkuasa atau elit politik (Rush & Althoff, 1997:235).

2 Fungsi Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik

Fungsi rekrutmen menurut Czudnowski adalah sebagai hubungan kritis antara pemerintah dan masyarakat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:161), sementara itu menurut Haryatmoko fungsi rekrutmen politik adalah sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan (awasiparlemen.org©2003).

Dalam pandangan Czudnowski, kalau dihubungkan dengan rekrutmen perempuan di bidang politik pada dasarnya adalah proses di mana seorang perempuan diberikan kesempatan terlibat secara aktif untuk mengambil peranan politik. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perempuan di bidang politik jelas-jelas merupakan suatu hubungan antara masyarakat dan sistem politik, dan sekaligus menempatkan struktur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini menggambarkan tiga dilema utama, yang dihasilkan dari kesamaan karakter dari sistem politik, yaitu:

1. Suatu tingkatan jabatan politik maupun jabatan administratif memerlukan kontinuitas institusional, akan tetapi kontinuitas itu sendiri mengimplikasikan suatu perubahan dari pemegang kekuasaan terhadap kepentingan perempuan.
2. Pembuatan kebijakan bertujuan pada relevansi, konsistensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi masyarakat menggambarkan hasil suatu kebijakan adalah untuk menjamin kelangsungan sosial, ekonomi, dan perubahan budaya yang memihak kepada kepentingan perempuan.
3. Pemerintahan senantiasa didasarkan pada otoritas, akan tetapi penetapan otoritas adalah subyek untuk melegitimasi melalui tanggapan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:165).

Dengan memberikan kesempatan secara aktif seorang perempuan untuk mewakili kelompoknya mengambil peranan politik (mengambil jabatan-jabatan politik dan administratif), maka persoalan pada masing-masing dilema tersebut di atas akan dapat dipecahkan pada waktu tertentu yang tergantung sampai seberapa besar dalam bentuk-bentuk umum dari rekrutmen perempuan di bidang politik. Jadi rekrutmen perempuan di bidang politik adalah suatu hubungan kritis antara pemerintah dan masyarakat, karena hal tersebut dapat menjalankan fungsi dari “penetapan sistem” dan dimaksudkan sebagai suatu saluran utama untuk suatu perubahan yang diinginkan terhadap kepentingan perempuan.

Artikulasi kepentingan perempuan adalah suatu proses peng-*input*-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan perempuan melalui wakil-wakil kelompok perempuan yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah, sebab kebijakan pemerintah dapat

bersifat menolong (memihak kepentingan) masyarakat dan bisa pula menyulitkan (tidak memihak kepentingan) masyarakat. Oleh karena itu, rekrutmen perempuan di bidang politik pada dasarnya adalah menempatkan wakil perempuan dari suatu kelompok dalam jabatan-jabatan politik untuk berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan negara.

Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijakan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya (awasiparlemen.org ©2003).

Agregasi kepentingan perempuan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok perempuan yang berbeda dapat disalurkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah. Agregasi kepentingan perempuan dijalankan dalam sistem politik yang memperbolehkan persaingan politik secara sehat dan transparan untuk menjalankan fungsi organisasi (pemerintahan) dan berbagai jabatan sesuai kebutuhan.

Jadi agregasi kepentingan perempuan adalah suatu proses rekrutmen perempuan di bidang politik yang dapat dipertanggung-jawabkan keterwakilannya, disamping kualitas, dan kemauan politik untuk selalu menempatkan kepentingan konstituen, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Dalam masyarakat demokratis, agregasi kepentingan dapat berjalan dimana partai politik dapat menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif tentang calon-calon yang diajukan untuk mengambil jabatan-jabatan pemerintahan, sehingga akan mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon-calon yang telah diajukan tersebut (awasiparlemen.org ©2003).

3 Sistem Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik

Suatu sistem rekrutmen perempuan di bidang politik jarang ditemukan, sebaliknya pada umumnya setiap negara atau masyarakat memiliki cara-cara khusus tentang sistem perekrutan perempuan di bidang politik bahkan kadangkala memiliki keragaman yang tiada terbatas. Namun secara umum, ada dua cara khusus berupa seleksi pemilihan melalui “ujian”

serta “latihan”. Kedua cara ini, tentu saja juga memiliki banyak sekali keragaman dan banyak sekali diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Selain itu, dapat dikemukakan beberapa metode lain yang kadang-kadang digunakan dan dalam beberapa hal masih dianggap penting dalam berbagai sistem politik.

Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin perempuan di bidang politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian. Secara umum, metode ini digunakan Yunani kuno. Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa oleh orang (khususnya laki-laki, pada saat itu) atau kelompok individu tertentu adalah dengan menggunakan sistem giliran atau *rotasi*. Sistem “pilih kasih” yang dipraktekkan di Amerika Serikat pada hakikatnya adalah suatu sistem perekrutan bergilir atau *rotasi*. Sejumlah negara lain mempunyai ketentuan-ketentuan konstitusional, yang dibuat untuk menjamin kadar *rotasi* personil eksekutif. Seperti, presiden dan wakil presiden Dewan Federal Swiss memangku jabatan hanya untuk setahun dan tidak boleh langsung dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Demikian pula amandemen ke 24 terhadap Konstitusi Amerika Serikat menentukan, bahwa tidak seorang presiden pun boleh dipilih lebih dari dua masa jabatan (Rush & Althoff, 1997:187).

Suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik (tanpa kecuali dengan melibatkan perempuan) adalah “perebutan kekuasaan” dengan jalan menggunakan atau mengancamkan kekerasan. Penggulingan dengan kekerasan suatu rejim politik, apakah hal itu berlangsung dengan *coup d’etat*, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat, acap kali dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari metode-metode sedemikian itu adalah penggantian para pemegang jabatan politik. Akan tetapi perubahan-perubahan dalam personil birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju (Rush & Althoff, 1997:188).

Selain cara-cara perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, terdapat juga cara lain yang lebih sering diasosiasikan dengan perekrutan yang berkesinambungan dari tipe personil yang sama. Salah satu alat sedemikian ini adalah cara *patronage*, yaitu suatu sistem yang tetap penting sampai sekarang terutama

di banyak negara berkembang. *Patronage* merupakan bagian dari suatu sistem penyusunan dan sistem korupsi yang rumit, yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pelbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, dan merupakan dukungan dalam perlemen yang berlangsung diantara beberapa pemilihan umum. Dan sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk masuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem *patronage* (Rush & Althoff, 1997:188).

Berbeda dengan sistem *patronage*, akan tetapi juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personil tertentu, ada lagi satu alat perekrutan yang jelas dapat disebutkan sebagai mampu memunculkan “pemimpin-pemimpin alamiah”.

Di masa lampau peristiwa sedemikian ini lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis yang didominasi oleh laki-laki. Dan hal ini tetap merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik. Jadi walaupun sekarang dapat dikemukakan bahwa pemimpin partai, semisal pemimpin konservatif di Inggris sudah tidak timbul lagi sejak adanya pemilihan oleh suara anggota-anggota perlemen konservatif, sistem politiknya tetap memaksakan sejumlah pembatasan kontekstual dengan cara mengurangi jumlah pemimpin-pemimpin konservatif potensial dari mana pilihan tersebut dimunculkan. Dengan kata lain, terlepas sama sekali dari konvensi bahwa seseorang itu secara normal harus menjadi anggota perlemen, seorang pemimpin konservatif juga harus memperlihatkan berbagai kemampuan yang memungkinkan dirinya memenuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh suatu sistem pemerintahan perlementer dan kampanye pemilihan yang efektif, kemampuan yang menandingi tuntutan-tuntutan perdebatan parlementer, kemampuan untuk memikul macam-macam tanggung jawab kepada jabatan yang tinggi dan sebagainya (Rush & Althoff, 1997:189-190).

Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin perempuan tertentu adalah dengan jalan “Koopsi” atau pemilihan anggota-anggota perempuan baru.

Secara tepat “Koopsi” (*co-option*) itu meliputi pemilihan seorang perempuan ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada, meski hal

itu hampir umum terdapat dalam lembaga-lembaga politik seperti Dewan Kota di Inggris dan Wales (baik lewat pemilihan anggota dewan yang bertugas menyusun perundang-undangan kota maupun sebagai sarana untuk memperbesar panitia). Namun demikian, suatu proses yang ada pada dasarnya sama merupakan dasar bagi perekrutan untuk Kabinet Amerika Serikat dan Kabinet Inggris. Kabinet Presiden tidaklah dipilih dari anggota legislatif, tetapi dari mana saja ia bisa memperoleh personil yang sesuai. Demikianlah seorang presiden boleh merekrut usahawan dan industrialis terkenal, para akademisi, dan ahli-ahli hukum, juga boleh mengangkat politisi terkenal dalam kabinetnya. Lebih jarang lagi terjadi, seorang Perdana Menteri Inggris dapat mengangkat “orang luar” ke dalam kabinetnya atau untuk suatu jabatan di luar kabinet (Rush & Althoff, 1997:192).

Suatu pemilihan dapat dinyatakan sebagai sarana untuk memilih diantara dua alternatif atau lebih, dengan jalan pemberian suara, akan tetapi disadari adanya keanekaragaman yang tiada terbatas pada sistem-sistem pemilihan. Sistem-sistem tersebut dapat berbeda, sejauh hal ini mengenai pemilihan para pemegang jabatan, yaitu berkenaan siapa yang dipilih. Oleh siapa dan bagaimana cara memilihnya. Dengan demikian pemilihan-pemilihan dapat digunakan untuk memilih para eksekutif maupun legislatif perempuan.

Hak untuk ikut serta dalam pemilihan dapat dibatasi pada taraf yang berbeda-beda dan metode khusus yang digunakan untuk memberikan suara serta menghitung suara itu mengalami keserba-ragaman yang banyak sekali (Rae, 1967:111).

Beberapa pemilihan yang dapat dilukiskan sebagai bentuk “tidak langsung”, yaitu para pemilih memberikan suaranya untuk satu kelompok individu perempuan yang kemudian merupakan satu badan pemilih presiden dan wakil presiden (*electoral college*), yang seterusnya memimpin pemilihan yang kedua untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan yang dipertaruhkan. Secara teknis, hal ini merupakan metode yang digunakan untuk memilih presiden di beberapa negara maju dan negara berkembang (Rae, 1967:114).

Bentuk “pemilihan langsung” terhadap pemegang jabatan adalah dilakukan secara terbuka oleh para pemilih, walaupun pilihan dari para pemilih tadi mungkin dibatasi oleh kualifikasi-kualifikasi hukum yang ditetapkan bagi para pemegang jabatan politik dan oleh metode-metode dengan mana partai-partai politik melakukan seleksi sederhana terhadap para

calon atau kandidat mereka. Dalam beberapa hal, kualifikasi hukum bagi para pemegang jabatan ternyata minimal; yaitu hanya menuntut, bahwa mereka itu harus orang dewasa, warganegara dari negara yang bersangkutan, waras dan sebagainya; akan tetapi pada peristiwa-peristiwa lainnya mungkin bersifat lebih terbatas. Presiden Amerika Serikat harus dilahirkan sebagai warganegara dari negara itu, paling muda harus berusia tigapuluh lima tahun, dan berdiam di Amerika Serikat selama empatbelas tahun. Demikian juga para senator Amerika Serikat juga harus menjadi warganegara (walaupun bukan kelahiran asli), paling sedikit dia harus berusia tigapuluh tahun dan berdiam di negara bagian yang diwakilinya (Rae, 1967:116).

Hak pilih orang dewasa yang universal merupakan dasar paling umum bagi pemberian suara pemilih. Akan tetapi hal ini biasanya dibatasi oleh faktor-faktor seperti kewarganegaraan, kesehatan jiwa, dan catatan kejahatan. Dalam beberapa sistem politik, pembatasan seperti itu dilakukan lebih luas lagi, dan mencakup kriteria lain, seperti mulek huruf, syarat-syarat pemukiman, dan juga kualifikasi kekayaan. Di masa lampau beberapa batasan tadi sangat keras sifatnya, karena itu kelompok pemilih hanya merupakan bagian minoritas dari rakyat. Dalam beberapa hal pembatasan hak pilih didasarkan pada argumen tentang sejauh mana para anggota kelompok pemilih harus merupakan orang-orang yang “bertanggung jawab”, atau sejauh mana mereka sanggup “membuat keputusan rasional” dalam pelaksanaan pemberian suara. Jadi menekankan masalah milik kelompok yang belakangan ini sebagai suatu *privilege* yang meliputi kewajiban maupun haknya (Rush & Althoff, 1997:196).

Pembatasan-pembatasan atas hak pilih kiranya mempunyai pengaruh yang penting pada tingkah-laku *voting*, dan karena itu juga terhadap pribadi yang akan dipilih untuk menduduki jabatan politik. Khususnya kejadian seperti ini berlaku dimana pembatasan-pembatasan diterapkan terhadap bagian-bagian tertentu dari rakyat, yang mungkin tetap tidak terwakili, ataupun paling sedikitnya hanya sebagian saja yang diberi hak bersuara. Perluasan sektional hak pilih tadi dapat dihubungkan dengan polarisasi berikutnya dari tingkah laku pemilih, dimana partai-partai timbul secara khusus untuk mewakili bagian-bagian dari rakyat. Di banyak negara Eropa, timbulnya partai-partai yang berusaha mewakili dan memobilisir kelas-kelas pekerja telah mengakibatkan golongan yang belakangan ini memperoleh jaminan perwakilan legislatif yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat, dimana tidak terdapat partai kelas pekerja yang giat (Michels, 1984:96).

Pembatasan atas hak pilih, secara historis penting dalam membantu menjelaskan persekutuan-persekutuan partai dan polarisasi elektoral dan dampaknya pun berbeda dengan dampak cara *voting*. Sistem-sistem pemilihan yang didasarkan atas “pluralitas sederhana” terlalu membesar-besarkan perbandingan kursi yang diperoleh partai yang menang dalam badan legislatif, sehubungan dengan suara dukungan yang diberikan dengan akibat timbulnya kerugian di pihak lawannya, terutama pada partai-partai ketiga atau partai-partai kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena negara terbagi dalam distrik-distrik pemilihan anggota tunggal, dalam distrik mana calon dengan suara terbanyak bisa menang dan dia tidak memerlukan mayoritas mutlak, dia bisa menang dengan satu suara atau dengan sepuluh ribu suara dan hasilnya pun sama. Karena keseimbangan antara kedua partai utama itu hampir sama, juga karena pemilih biasanya tersebar merata ke arah yang sama di seluruh negara, maka hasil dari sejumlah distrik pemilihan yang penting ditentukan oleh suara-suara yang relatif sedikit, sehingga partai yang memenangkan pemilihan umum akan memperoleh perbandingan kursi yang lebih tinggi dari suara yang dipungut di seluruh negara (Michels, 1984:99).

Di banyak negara lainnya, koalisi-koalisi merupakan norma dan kemungkinan berlangsungnya sering diberi fasilitas dengan adanya sistem-sistem pemilihan yang didasarkan pada perwakilan yang proporsional sebanding. Keanekaragaman tipe dari perwakilan yang proporsional itu banyak sekali dan setiap tipe diasosiasikan dengan hasil-hasil khusus. Beberapa tipe menguntungkan partai-partai besar, beberapa lagi menguntungkan partai kecil, yang lain menguntungkan partai-partai yang terorganisir dengan baik dan sebagainya. Akan tetapi masing-masing berusaha untuk berbagi secara adil kursi dalam badan legislatif, sesuai dengan dukungan yang diperoleh partai pada suatu pemilihan. Hal ini berarti, lebih sukar bagi suatu partai untuk memperoleh suatu mayoritas mutlak dalam badan legislatif (Michels, 1984:103).

4 Konsep Dan Model Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik

4.1 Konsep Rekrutmen

Beberapa studi telah menjadikan rekrutmen perempuan di bidang politik menjadi fokus sentral kajian. Hipotesis rekrutmen dan pendasaran interpretasi seringkali merupakan garis penghubung dari analisis pada studi elit politik perempuan yang mencakup batasan yang meluas terhadap

persoalan yang lain. Kepentingan dalam siapa perempuan yang dipilih merupakan pertanyaan sebelum pada bagaimana dia dipilih. Pertanyaan juga menyinggung pada profil sosial dan demografi dari politisi perempuan lebih mudah terjawab dibanding pada usaha untuk merekonstruksi suatu proses yang mencakup situasi masa lalu, motivasi, sikap, dan perilaku. Perhatian implisit ataupun eksplisit rekrutmen dapat ditemukan dalam studi-studi mengenai perilaku elit politik perempuan dalam pembuatan keputusan institusi pada tingkatan pemerintah yang berbeda, konsep tentang kepemimpinan, analisis terhadap struktur dan fungsi partai, serta kualifikasi kandidat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:160). Konsep rekrutmen pada bahasan ini lebih difokukan pada kajian tentang analisis kualifikasi kandidat perempuan dan fungsi partai.

Konsep ideal rekrutmen perempuan di bidang politik menurut Almond digambarkan sebagai kegiatan “merekut anggota-anggota perempuan dari masyarakat dan dari subkultur khusus – komunitas keagamaan, status, klas, komunitas etnik, dan yang serupa – dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik” (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:161).

Dalam pandangan Almond rekrutmen perempuan di bidang politik seharusnya dapat mewedahi semua kepentingan politik dari kelompok yang diwakilinya. Oleh sebab itu kualifikasi rekrutmen perempuan ditentukan oleh latar belakang pribadi, profesi, pendidikan, kemampuan, pengalaman politik dan kedekatan atau basis dukungan yang dimiliki. Terutama kualifikasi pendidikan menjadi dasar dominan untuk rekrutmen jabatan administratif (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:162).

Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Edinger menjelaskan bahwa rekrutmen perempuan di bidang politik berkaitan erat sebagai profesi seseorang. Oleh sebab itu kualifikasi rekrutmen seharusnya didasarkan pada kemampuannya secara kontinyu. Weber menolak rekrutmen hanya sebagai pemenuhan tujuan pribadi. Menurutnya, yang terakhir disebut sebagai “hidup dari politik”, mereka yang hidup dari politik menampilkan perilaku politik yang lebih mengedepankan penghargaan yang diterimanya, sehingga kalkulasi politik yang diperoleh seringkali diukur dengan keuntungan pribadi. Semestinya rekrutmen dapat menghasilkan komitmen pribadi yang disebutnya sebagai “hidup untuk politik”. Inilah menurut Weber yang disebut dengan profesional politik, yaitu mereka yang aktif atau *full-time*

secara kontinu, terlepas dari tipe penghargaan yang dia harapkan atau diterimanya (Edinger, (ed.), 1971:158).

Sementara itu, menurut Sartori (1967), profesionalisasi tidak hanya melibatkan aktivitas *full-time* dan kehidupan “untuk politik”. Perbedaan kritisnya adalah antara siapa melakukan dan siapa pula yang tidak memiliki alternatif pekerjaan secara aktual dan potensial. Sartori menganggap siapa yang masih memiliki sedikitnya alternatif pekerjaan potensial dapat disebut sebagai profesional politik (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:163).

Wilson (1962) menjelaskan bahwa konsep amatir mendasarkan penghargaan instrinsik dalam politik: ketentuan dalam kebijakan publik berdasarkan prinsip, karena bertentangan pada penghargaan ekstrinsik terhadap kekuatan profesional, pendapatan, status, dan kesenangan permainan. Profesional memahami politik dalam hal kemenangan pemilihan atau dalam hal kepentingan partai, konsepsi yang biasanya melibatkan pembuatan kompromi dan minat pada kepentingan khusus. Amatir memahami politik dalam hal persoalan non substantif atau prosedural. Profesional bekerja dalam organisasi partai besar; amatir mendasarkan dalam klub-klub (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:163-164).

Perbedaan antara amatir dan profesional telah menunjukkan bahwa kriteria dasar dari perbedaan menunjuk pada salah satu dari sindrom motivasional atau pada karakteristik dari keterlibatan perilaku (aktivitas berkelanjutan atau petugas *full-time*). Hanya saja definisi Sartori mengenai profesionalisasi sebagai suatu pekerjaan “tidak bertitik balik” telah dihubungkan baik pada variabel motivasi dan perilaku. Tapi, aplikasi hal ini dibatasi pada partai yang telah terorganisasi dengan baik dan tersentral mengenai pembagian pekerjaan dan subkultur lainnya dalam sistem dengan kultur politik yang telah mapan. Tapi, “tidak bertitik balik” hanyalah suatu kasus khusus dalam batasan kemungkinan hubungan antara keterlibatan motivasi dan perilaku. Pengujian terhadap hubungan ini akan memberikan beberapa pedoman yang berguna untuk memilih kriteria bagi definisi operasional dari kegiatan rekrutmen (Hofstetter, 1971:49).

Konsep tersebut seperti motivasi bertujuan dan tak bertujuan adalah kategori dasar dari sejumlah perbedaan dan orientasi tujuan yang dapat dipertimbangkan dalam intensitas mereka. Selanjutnya, intensitas publik dan orientasi pribadi satu sama lain saling tidak terikat; seseorang dapat memiliki “perasaan” yang kuat mengenai persoalan khusus tapi hanya memiliki

motivasi yang lemah untuk berpartisipasi dalam usaha kelompok untuk melakukan sesuatu mengenai hal itu, karena partisipasi melibatkan biaya. Ketika biaya rendah, orientasi pribadi kurang intensif yang akan cukup untuk memotivasi partisipasi dalam masyarakat atau persoalan politik. Pada saat tingkat biaya tinggi kebutuhan intensitas motivasi juga akan mencapai pada tingkat yang tertinggi. Akan terdapat sedikit orang yang mampu “membayar” kesempatan biaya yang tinggi dan jumlah motivasi yang mana dapat mencapai tingkat intensitas yang diperlukan untuk melanjutkan seluruh kemungkinan alternatif penggunaan dari sumber yang akan dikurangkan pada sejumlah kecil kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan ini adalah kelangsungan hidup, keamanan, penerimaan, harga diri (status, prestise, kebanggaan), dan aktualisasi diri (pengaruh, kekuatan – dalam area kehidupan secara umum dan khusus), dan menurut Maslow, bahwa hal tersebut merupakan hierarki motivasi dalam perilaku manusia (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:168).

Para ahli sependapat bahwa partai politik merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut (secara langsung) sebagian besar perempuan dalam jabatan politik dan (secara tidak langsung) dalam jabatan administratif, meskipun cara mereka melakukannya di banyak negara adalah berbeda satu sama lainnya. Pentingnya partai politik sebagai agensi perekrutan perempuan, dilukiskan sejauh mana partai-partai tertentu merupakan wahana perekrutan para pemegang jabatan politik dan administratif, seperti yang dilakukan terhadap laki-laki oleh Partai Buruh di Inggris, Partai Komunis dan Partai Sosialis di Perancis, Partai Demokrat Sosial di Jerman dan ALP di Australia (Rush & Althoff, 1997:245).

4.2 Model Rekrutmen

a. Model Seligman dan Jacob

Model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan perempuan di bidang politik, ditegaskan oleh Seligman (1961), ia memandang rekrutmen sebagaimana terdiri dari (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan – yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:171). Jacob (1962) telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu perempuan memiliki sifat

kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen (perempuan) menurut Jacob dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat perempuan, dan secara “terbuka” dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:172).

b. Model Barber

Barber (1965) seperti dikutip oleh Edinger, memperkenalkan suatu model rekrutmen perempuan di bidang politik yang agak berbeda dengan Seligman dan Jacob. Menurutnya ada tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen perempuan di bidang politik, yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan; akhirnya, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Edinger, 1971:138).

Browning (1968) sebagaimana dikutip oleh Edinger, memperkuat model Barber menurutnya perilaku perekrutan perempuan di bidang politik ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan oleh motivasi dominannya. Ketika kekuatan motif tinggi dan pencapaian motif rendah, perilaku berorientasi pada organisasi; ketika kekuatan dari motivasi berbalik, perilaku disangkutken dengan kebijakan; dan ketika motif pencapaian dan kekuatan tinggi, perilaku dipengaruhi kebijakan. Afiliasi motif yang tinggi mengarah pada perilaku pasif, dan ketika hanya status motif yang tinggi, perilaku berorientasi pada status. Variabel kesempatan sistemik dalam model Browning mencakup tingkat perputaran dalam jabatan, tingkat akses dari pejabat ke pejabat, tingkat kontrol oleh pemimpin partai pada nominasi, dan kemungkinan dari kemenangan pemilihan (Edinger, 1971:144).

c. Model Snowiss

Model Snowiss (1966) sebagaimana dikutip oleh Edinger, mengemukakan model perekrutan perempuan di bidang politik dengan memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Terdapat empat variabel dalam model ini: (1) Dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibanding elektoral umum, (2) Sumber daya organisasi yang dapat digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerja partai dan menarik para elit politik; material atau non material, (3) Struktur; hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi dunia luar (berhubungan dengan insentif material), (4) Etos organisasi. Struktur hierarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik; partai-partai yang kurang terstruktur mempromosikan orientasi persoalan, etos ideologi. Untuk menyatakan bahwa partai-partai dapat mengontrol pemilihan para kandidat, perekrutan akan merefleksikan etos organisasi. Ketika perekrutan berlangsung dari dalam organisasi, etos ini akan berlaku dalam memilih kandidatnya. Tapi dalam situasi yang amat kompetitif, partai dapat merekrut kandidat langsung dengan tidak memisahkan etosnya (Edinger, 1971:158).

d. Model Rush & Althoff

Menurut Michel Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi 5 proses kegiatan yang dapat diterapkan juga pada perekrutmen perempuan di bidang politik, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan.

Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Beberapa agensi tersebut sedikit atau banyak bekerja secara formal (seperti komisi perekrutan administratif) dan secara informal (seperti kelompok kepentingan tertentu). Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka-ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan ketrampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, dengan jalan mendorong atau menakut-nakuti orang-orang dengan karakteristik atau ketrampilan secara khusus, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 1997:245-246).

5 Kesimpulan

Berbagai teori dan model rekrutmen perempuan di bidang politik yang dibahas di atas sejatinya merupakan suatu upaya mendekatkan perempuan pada konsep sebenarnya tentang rekrutmen perempuan di bidang politik yang sebenarnya sebuah ruang baru yang dicoba untuk dimasuki oleh perempuan.

Kemampuan perempuan dalam mengimplementasikan teori-teori tersebut merupakan kemampuan tersendiri yang tentu membutuhkan waktu dan pengalaman serta keberanian. Dalam banyak hal tentu teori tersebut tidak mengajarkan kepada perempuan untuk mengemis untuk mendapatkan ruang-ruang politik yang diinginkan karena pada dasarnya bahwa ruang politik itu adalah wacana laki-laki, wacana *patriachi* yang telah berlangsung sejak adanya masyarakat manusia. Ketika manusia modern mendorong perempuan kearah apa yang telah dilakukan laki-laki dalam dunianya selama ini, maka tentu hal itu tak akan dapat dihadiahkan begitu saja kepada perempuan, kecuali harus diperebutkan oleh perempuan itu sendiri.

Masyarakat “laki-laki” pun membiarkan ruangnya diambil oleh perempuan “hebat” dengan aturan main yang *fair* sebagaimana hukum-hukum politik masyarakat. Hal ini tentu secara langsung juga ikut mencabut hak-hak perempuan terhadap fasilitas keutamaan di tempat umum karena alasan emansipasi, sebagaimana ajaran moral masyarakat yang selalu membela perempuan di tempat umum. Jadi emansipasi sekaligus juga mencabut hak-hak keutamaan perempuan di sektor publik, karena kalau tidak, perempuan akan menjadi jenis manusia teregois di bumi dengan mendapatkan berbagai keutamaan dan fasilitas sosial sementara mereka menyebarkan dan mengobarkan semangat persamaan hak dengan laki-laki.

Jadi perspektif teoritis model rekrutmen perempuan di bidang politik ini memberi pelajaran kepada perempuan bagaimana cara merebut kekuasaan politik itu dari tangan laki-laki sesuai dengan order sosial sehingga mereka secara terhormat menempatkan posisi-posisi politik itu, tanpa harus menyebar issue tentang sentimen-sentimen laki-laki terhadap hak-hak perempuan modern yang saat ini terus menerus diperjuangkan. ()

DAFTAR PUSTAKA

- Alderfer, C.P. 1969. "An Emprical Test of New Theory of Human Needs". *Organizational Behavior and Human Performance*, Mei 1969.
- Apter, David E. 1987. *Politik Modernisasi*. Jakarta : PT Gramedia,.
- Arnold, H.J., "A Test of the Multiplacative Hypothosis of Expectency-Valence Theories of Work Motivation", *Acadenmy of Management Journal*, April, 1981.
- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Czudnowski, M.M. 1975. *Comparing Political Behavior*. Chicago: Aldine-Atherton.
- Rae, Douglas. 1967. *The Political Consequence of Electoral Laws*. New Haven.
- Duverger, Maurice. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Edinger, Lewis J., (ed.) 1971. *Recruiting Political Elit*. New York: General Learning Press,.
- Faturrohman, Deden dan Sobari, Wawan.. 2002. *Ilmu Politik*. Malang: UMM Pers.
- Finkle, Jason L., & Gable, Richard W. 1971. *Political Development and Social Change*, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Goble. Frank G. 1992. *Mazhab Ketiga, Psikhologi Humanistik Abraham Maslow*. Jakarta: Kanisius.
- Greenstein, Fred I., & Polsby, Nelson W., (Ed.). 1975a. *Govermental Institutions and Processes*, Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.
- , 1975b. *Micropolitical Theory*.. Philippines: Addison-Wesley Publsing Company,.
- Hein, at.al. 1993. "Evaluation and Comparison of Three Instruments Designed to Measure Organizational Power and Influence Tactics", *Journal of Aplied Social Psychology*, Januari 1993

- Hofstetter, Richard C.. 1971. "The amateur politician: a problem in construct validation", *Midwest Journal of Political Science*, Vol 15
- Indrawijaya, Adam I. 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kacmar, K.M., & Ferris, G.R., "Politik at Work: Sharpening the Focus of Political Behavior in Organizations". *Business Horizons*, Juli-Agustus 1993.
- Katerberg, R., & Blau, G.B., "An Examination of Level and Direction of Effort and Job Performance", *Academy of Management Journal*, Juni, 1983.
- Kipnis, D., 1974. "The Powerholder". dalam J.T. Tadeschi (ed.). *Perspective in Social Power*, Chicago: Aldine, 1974.
- Maples, MF. 1988. "Group Development: Extending Tuckman's Theory". *Journal for Specialists in Group Work.*, 1988.
- Maslow, A. 1964. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row.
- Mitzberg, H. 1983. *Power in and Around Organizations*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
- Nicholson, Norman K., 1971. "The Factional model and the study politics", *Comparative Political Studies*, Vol 5, 1971.
- Poole, P.P., 1983. "Coalitions: The Web of Power", dalam *Research and Application, Proceedings of the 20th Annual Eastern Academy of Management*, D.J. Vredenburg and R.S. Schuler (ed.), *Effective Management*, Pittsburgh. Mei 1983
- Pfeffer, J. 1992. *Managing with Power*. Boston: Harvard Business School Press.
- Rokeach. 1973. *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
- Rush, Michael & Althoff, Philip. 1997. *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Warsito, Tulus. 1999. *Pembangunan Politik, Refleksi Kritis atas Krisis*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.